

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; 2) untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan pada reklamasi pasca tambang batubara di PT. Mineral Bara Perkasa, PT. Minimax dan PT. Sarolangun Prima Could di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi struktural dan operasional Dinas ESDM Provinsi Jambi; 2) penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran reklamasi pasca tambang batubara pada PT. Mineral Bara Perkasa dan PT. Sarolangun Prima Could di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi bahwa pengenaan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi bekas tambang batubara di Provinsi Jambi, hanya berupa teguran lisan, tertulis. Teguran lisan, teguran tertulis dalam kaitan perpanjangan izin yang tidak segera diurus. Hal ini dilakukan hampir seluruh perusahaan pertambangan batubara di wilayah Provinsi Jambi.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Administrasi, Reklamasi Pasca Tambang Batubara.*